

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Dinas Perhubungan ialah lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan transportasi di Indonesia. Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola berbagai sektor transportasi, termasuk perhubungan darat, udara, laut dan telekomunikasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengatur, serta mengawasi sistem transportasi di wilayah Kota Banjarbaru. Dinas Perhubungan ini berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, baik dari segi pelayanan transportasi publik, penataan lalu lintas, maupun sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Kota Banjarbaru menjadi kota administratif resmi pada tahun 1999, dinamika perubahan pemerintahan menentukan perkembangan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Dengan pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, tidak hanya terbentuk kota yang baru, tetapi juga diperlukan perangkat daerah yang mampu mengelola urusan pelayanan publik secara mandiri. Struktur pemerintahan mulai dibangun setelah Akhmad Fakhruddin dilantik sebagai Wali Kota pertama yang menandai awal masa pemerintahan di Kota Banjarbaru.

Secara administratif, Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Kota ini terus mengalami perkembangan pesat, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun jumlah penduduk. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan transportasi publik yang efisien, aman, dan terjangkau.

Sejarah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru resmi berdiri sejak awal masa kotamadya yang diperkirakan tahun 2000 saat struktur pemerintah daerah disesuaikan. Peraturan kelembagaan Dinas Perhubungan dijabarkan melalui Perwali No.44/2016 tentang Struktur Tupoksi serta di perkuat Perwali No.59/2017 tentang unit teknis UPT, dan disempurnakan lewat Perwali No.78/2023 sebagai dasar terbaru penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sesuai kebutuhan pelayanan transportasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru semakin diarahkan untuk menerapkan pelayanan yang modern dan berbasis digital. Seperti uji KIR kendaraan, pengelolaan perparkiran, hingga sistem pengaturan lalu lintas mulai mengintegrasikan teknologi informasi guna untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi pelayanan. Langkah ini sejalan dengan visi dinas untuk menghadirkan sistem transportasi yang berkualitas, aman, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat tentunya di Kota Banjarbaru.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Jl.Palam Rt.047 Rw.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70724. Lokasi ini menjadi pusat kegiatan administrasi dan koordinasi seluruh program kerja yang berkaitan dengan transportasi.

Dalam Struktur organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dengan beberapa bidang yang melaksanakan fungsi operasional, yaitu:

- a. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan.
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, dan
- d. Unit Pelaksanaan Teknis

2. Visi, Misi, dan 5 Citra Perhubungan

a. Visi

“Mewujudkan Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Berkualitas Dan Berkarakter”. Menciptakan sistem transportasi yang Berkualitas melibatkan Efisiensi, Efektivitas, Keamanan, Kenyamanan, dan Ketersediaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan baik, serta berkarakter dengan Integritas, Empati, Profesionalisme, keterbukaan, dan Komitmen membangun kepercayaan dan reputasi positif bagi penyedia layanan transportasi.

b. Misi

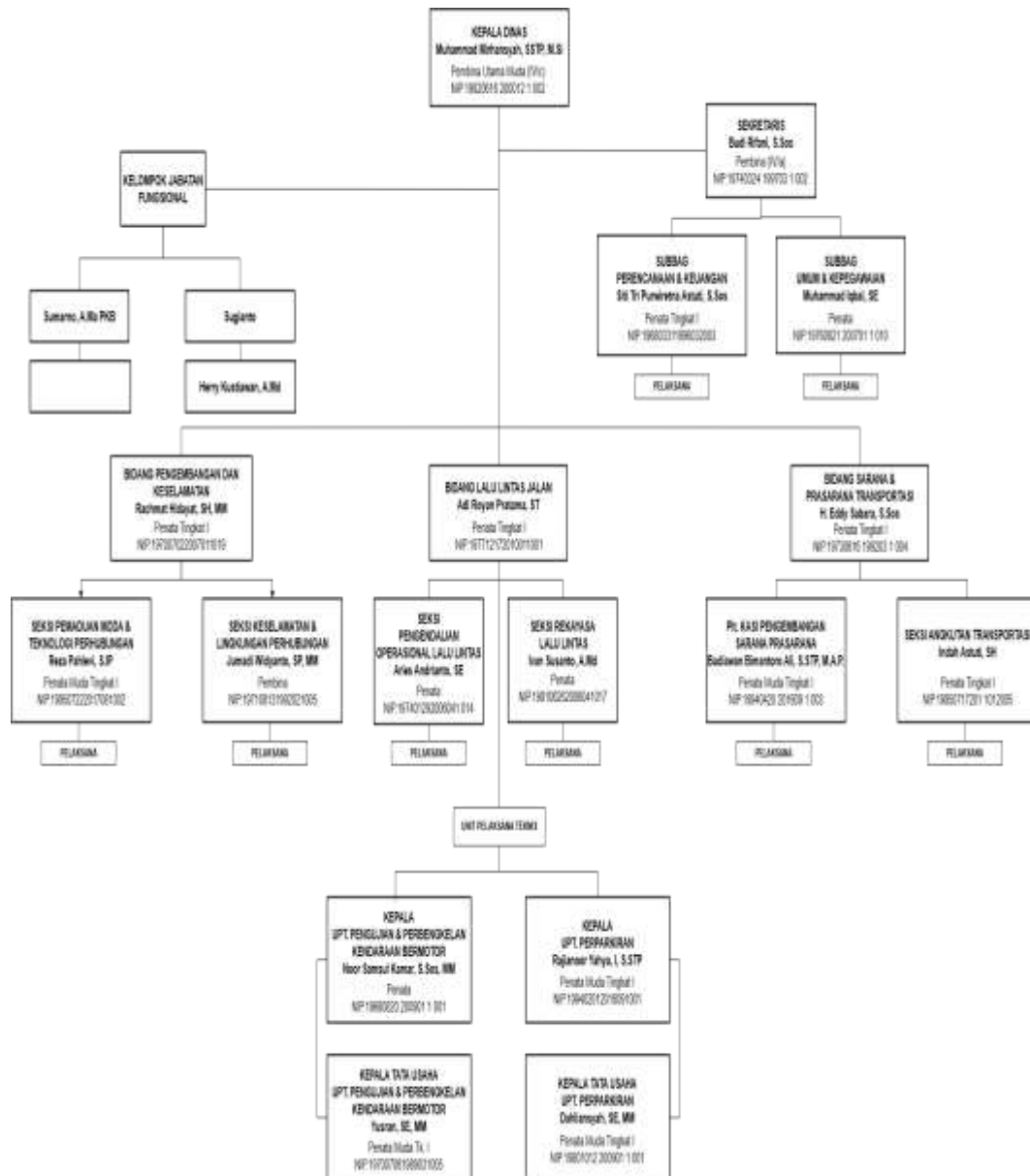
- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penertiban lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam mendukung Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 2) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan, perparkiran, terminal, pengujian kendaraan bermotor, dan operasi trayek angkutan transportasi darat.
- 3) Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung segala aspek pelayanan transportasi.
- 4) Termanfaatkannya jasa sarana dan prasarana fasilitas lalu lintas guna peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

c. 5 Citra Perhubungan

- 1) Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman.
- 3) Tangguh menghadapi tantangan.
- 4) Terampil dan berperilaku jujur, gesit, ramah, sopan serta lugas.
- 5) Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru



Sumber: Website Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (diakses pada 6 November 2025)

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tercantum dalam Salinan Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun

2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Yang berbunyi “Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Walikota Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru”. Berikut tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru:

- a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Transportasi.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan.
 - d. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
 - e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis Perhubungan

“Menyusun kebijakan operasional terkait lalu lintas, angkutan jalan, perparkiran, terminal, dan pengujian kendaraan bermotor”.
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perhubungan

“Melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan transportasi darat, termasuk pengelolaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas keselamatan jalan”.

3) Pelayanan Perizinan dan Administrasi Transportasi

“Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait izin trayek, parkir, terminal, dan uji kendaraan (KIR)”.

4) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana

“Transportasi Merancang dan memelihara fasilitas pendukung transportasi seperti halte, terminal, traffic light, trotoar, dan jalur sepeda”.

5) Koordinasi dan Pengawasan Transportasi Umum

“Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban angkutan umum dan integrasi sistem transportasi”.

6) Pelaksanaan Edukasi dan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

“Memberikan sosialisasi dan pendidikan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, pelajar, dan pengemudi”.

7) Pengembangan Inovasi Layanan Transportasi

“Mengembangkan sistem transportasi cerdas seperti parkir digital (QRIS), sistem pemantauan lalu lintas, dan layanan digital publik lainnya”.

8) Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

“Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi program untuk peningkatan kualitas layanan perhubungan”

5. Gambaran Umum Transportasi Publik Feeder Trans Banjarbaru

Tabel 4. 1 Daftar Petugas Feeder Trans Banjarbaru

No	Petugas	Jumlah
1	Operasional	6 Orang
2	Management	3 Orang
3	Mekanik	5 Orang
4	Pramudi	57 Orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melalui Operasional Feeder Trans Banjarbaru, Data diolah Tahun 2025

Tabel 4. 2 Jumlah Armada Feeder Trans Banjarbaru

NO LAMBUNG	TRAYEK	JUMLAH ARMADA (UNIT)
TB. I-01	TRAYEK 1	2
TB. I-02	TRAYEK 1	
TB. II-01	TRAYEK 2	2
TB. II-02	TRAYEK 2	
TB. III-01	TRAYEK 3	2
TB. III-02	TRAYEK 3	
TB. IV-01	TRAYEK 4	3
TB. IV-02	TRAYEK 4	
TB. IV-03	TRAYEK 4	
TB. V-01	TRAYEK 5	2
TB. V-02	TRAYEK 5	
TB.VI.01	TRAYEK 6	2
TB. VI-02	TRAYEK 6	
TB. VII.01	TRAYEK 7	2
TB. VII-02	TRAYEK 7	
TB. VIII-01	TRAYEK 8	3
TB. VIII-02	TRAYEK 8	
TB. VIII-03	TRAYEK 8	
TB. IX-01	TRAYEK 9	2
TB. IX-02	TRAYEK 9	
TB. X-01	TRAYEK 10	2
TB. X-02	TRAYEK 10	

TB. XI-01	TRAYEK 11	2
TB. XI-02	TRAYEK 11	
CAD-01	CADANGAN	2
CAD-02	CADANGAN	
JUMLAH UNIT		26

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melalui Operasional Feeder Trans Banjarbaru, Data diolah Tahun 2025

**Tabel 4. 3 Rute Feeder Trans Banjarbaru
Trayek I - XI**

TRAYEK I		TRAYEK II	
No	Nama Halte	No	Nama Halte
1	Halte Al Mukarromah	1	Lapangan Rebatig
2	RS AURI	2	SDN 1 Komet
3	Perumahan Citra Bangun Persada	3	Apotek Taruna Praja
4	Indomaret Sei Karangan	4	Indomaret Karang Anyar 2
5	Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur	5	Kevin Cafe
6	Kantor Kecamatan Landasan Ulin	6	Indomaret Kebun Karet
7	Sidomulyo Raya	7	Halte Hajjah Nuriyah
		8	Perumahan Mustika
		9	Langgar Nurul Hikmah (Nadjmi Adhani)
TRAYEK III		TRAYEK IV	
No	Nama Halte	No	Nama Halte
1	Halte Al-Muhtadien	1	Halte Hajjah Nuriyah
2	Jl. Gotong Royong	2	Seberang Indomaret Nusantara
3	Swargaloka Golf	3	Pasar Bauntung
4	Jl. Makmur	4	Indomaret Trikora
5	Gang Sidodadi	5	Masjid Agung Al-Munawwaroh
6	Angkasa Kurnia Resort	6	Indomaret Bundaran Palam
		7	Mini Soccer Palam
		8	Abadi III
		9	Seberang Jalan Kuda Mas
		10	Komplek Wengga Trikora Tahap I
		11	RSUD Idaman
		12	SMK Bakti Bangsa

		13	Embung
		14	Arutmin
TRAYEK V		TRAYEK VI	
No	Nama Halte	No	Nama Halte
1	Terminal Simpang Empat	1	GOR Rudy Resnawan
2	Halte ATPN	2	Halte Dishub Palm Banjarbaru
3	Tombo Ngelak	3	Halte AlAzhar Residence
4	BLK Prov. Kalsel	4	Perum Lambung Mangkurat A
5	Indomaret P.M Noor 2	5	Amanah Borneo Park
6	Halte BPI	6	SDN 2 Palm
7	SDN 4 Sungai Ulin	7	Perum Lambung Mangkurat B
8	Yonif 623	8	Al-Azhar Residence (Abadi III)
9	Kelurahan Sungai Ulin	9	Foodcourt Bundaran Palam
10	Komplek Griya Asri Abadi 2	10	Masjid Agung Al-Munawwaroh
11	Grand Valencia Regency		
12	Simpang Kasturi IV		
TRAYEK V		TRAYEK VI	
No	Nama Halte	No	Nama Halte
1	Terminal Simpang Empat	1	GOR Rudy Resnawan
2	Halte ATPN	2	Halte Dishub Palm Banjarbaru
3	Tombo Ngelak	3	Halte AlAzhar Residence
4	BLK Prov. Kalsel	4	Perum Lambung Mangkurat A
5	Indomaret P.M Noor 2	5	Amanah Borneo Park
6	Halte BPI	6	SDN 2 Palm
7	SDN 4 Sungai Ulin	7	Perum Lambung Mangkurat B
8	Yonif 623	8	Al-Azhar Residence (Abadi III)
9	Kelurahan Sungai Ulin	9	Foodcourt Bundaran Palam
10	Komplek Griya Asri Abadi 2	10	Masjid Agung Al-Munawwaroh
11	Grand Valencia Regency		
12	Simpang Kasturi IV		
TRAYEK VII		TRAYEK VIII	
No	Nama Halte	No	Nama Halte
1	Balai Kota Banjarbaru	1	Halte KM 0
2	Masjid Khanzul Khairat	2	Kampus Uniska Banjarbaru

3	Halte Simpang Sukarelawan	3	Mushola Darul Aman
4	Halte SMK YPK	4	Halte Gg. Safwah
5	Bundaran STM	5	Jalan Puyau
6	SMA 2 Banjarbaru	6	Jalan Dahlina Raya
7	Harry Futsal (Gt. Royong III)	7	Jalan Haruan (Bengkel Antika)
8	Kampus JPK	8	GOR Rudy Resnawan
9	Puskesmas Banjarbaru Utara	9	SMA PGRI 1
10	Langgar Nurul Hikmah	10	Kelurahan Kemuning
12	Taman Kreasi	11	Simpang 4 Kemuning
		12	Simpang 3 Kemuning
TRAYEK IX		TRAYEK X	
No	Nama Halte	No	Nama Halte
1	Halte Carsurin	1	RSDI
2	Istana Pentol Mangin	2	Komp Disabilitas
3	Komplek Swarna I	3	Wengga Kuda Mas
4	Pasar Sukamara	4	SDI Al - Madani
5	Graha Mitratama	5	MI Al- Istiqomah
6	Perum Sriwijaya Regency/Mushola Qoryatun Thoyyibah	6	SMPN 8
7	Perum Yopi/Simp Komp. Keruing	7	Komp. Benawa Raya
8	SMAN 4 Banjarbaru	8	Mesjid Al - Hamidin
		9	Kantor Kel. Gt Manggis
		10	Kampus 2 STIEPAN
		11	Perum Pesona Bhayangkara
		12	SMPN 14 A
		13	AKR
		14	Kantor Kec. Landasan Ulin
		15	SMPN 14 B
		16	Komp. Pesona Puri Banjar Asri
		17	RTH Gt. Manggis
TRAYEK XI			
No	Nama Halte		
1	SMP 9		
2	Bina Putra		

3	PKM Gt. Manggis
4	Kantor Kel. Guntung Payung
5	Jl. Karet Indah
6	BSIP/BALITRA

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melalui Operasional Feeder Trans Banjarbaru, Data diolah Tahun 2025

Tabel 4. 4 Fasilitas Unit Feeder Trans Banjarbaru

NO	FASILITAS
1	AC Double Blower
2	Pintu Otomatis
3	3 Titik CCTV
4	Kursi Prioritas
5	Kotak P3K
6	Kursi Reguler
7	Palu Darurat
8	Monitor Telematik
9	Tombol Telematik
10	APAR
11	Running Text
12	Sensor Wajah
13	Lampu Dalam Kabin
14	Sensor Marka
15	Pintu Darurat
16	Monitor LED

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melalui Operasional Feeder Trans Banjarbaru, Data diolah Tahun 2025

6. Deskripsi Hasil Wawancara

Sebelum melaksanakan wawancara utama yang berpedoman pada daftar pertanyaan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara pendahuluan dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Wawancara pendahuluan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh pemahaman umum mengenai kondisi di lapangan serta untuk mengetahui

bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan dalam pengelolaan transportasi publik, khususnya pada layanan Trans Banjarbaru.

Wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan November 2025 memberikan data hasil temuan peneliti. Berdasarkan wawancara pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap satu orang informan mengenai Respon seorang kepala bidang angkutan transportasi mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan angkutan transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan tersebut, diperoleh informasi bahwa layanan Trans Banjarbaru tidak sepenuhnya dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, melainkan bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Perusahaan PT. Bagong Dekaka Makmur. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berperan sebagai pengawas, penentu kebijakan, dan pemberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan transportasi publik, sementara PT. Bagong Dekaka Makmur bertanggung jawab terhadap pengoperasian lapangan, termasuk pengelolaan armada dan layanan penumpang.

Selain itu, wawancara pendahuluan tersebut diketahui bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak secara langsung diterapkan pada kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan anggaran yang diperuntukkan bagi sektor publik dianggap sebagai anggaran prioritas, sehingga tidak mengalami pengurangan atau efisiensi yang signifikan. Tujuan

utamanya adalah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan penurunan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu contohnya terdapat pada layanan Trans Banjarbaru yang hingga saat ini masih digratiskan bagi penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru masih dalam tahap pengenalan dan penguatan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik Trans Banjarbaru.

Kebijakan Layanan Transportasi Umum Gratis ini bertujuan untuk mengukur antusias dan partisipasi masyarakat terhadap layanan transportasi publik di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, meskipun efisiensi anggaran menjadi kebijakan umum pemerintah daerah, namun pada sektor ini tidak dilakukan pengurangan anggaran, sebab orientasinya masih pada peningkatan minat dan kesadaran masyarakat dalam beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

Adapun bentuk dampak efisiensi yang tampak secara tidak langsung, antara lain pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti halte dan fasilitas penunjang di titik-titik pemberhentian. Pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menyebutkan bahwa beberapa pembangunan halte mengalami penyesuaian waktu dan jumlah, sebagai bagian dari upaya efisiensi, namun tanpa mengganggu operasional utama Transportasi Publik Trans Banjarbaru.

“Untuk Trans Banjarbaru memang belum ada penerapan efisiensi yang besar, karena program ini masih digratiskan untuk masyarakat. Tapi kalau

seperti pembangunan halte atau sarana kecil lainnya memang ada penyesuaian atau pengurangan anggaran” (Hasil wawancara pendahuluan dengan Kepala Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana Transportasi, 2025).

Pihak informan juga menjelaskan bahwa program efisiensi lebih banyak diterapkan pada kegiatan administratif atau pengeluaran operasional internal, seperti penyesuaian biaya perjalanan dinas, kebutuhan perkantoran, dan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Dengan demikian, efisiensi dilakukan tanpa mengganggu fungsi utama pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dari wawancara pendahuluan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru lebih diarahkan pada kegiatan administratif dan pembangunan fisik pendukung, bukan pada kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Anggaran untuk layanan publik seperti Trans Banjarbaru tetap dipertahankan demi menjaga fungsi sosial dan pemerataan manfaat bagi warga Kota Banjarbaru.

Masuk pada penelitian yang berpedoman pada Pedoman Wawancara Utama secara langsung, peneliti berhasil mengumpulkan data terkait Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pengelolaan Transportasi Publik yang dijalankan dalam pelaksanaannya pada Dinas Perhubungan. Dalam penelitian ini, informan adalah orang-orang yang ada dalam keterlibatan mengenai Efisiensi Anggaran Terhadap Pengelolaan Transportasi Publik di Kota Banjarbaru. Oleh karena itu data tersebut, peneliti telah menentukan informan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari Lima informan, yaitu Kepala Sub-Bagian Keuangan,

Kepala Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana Transportasi, Staf Bidang Operasional, Sopir Feeder, dan Pengguna Feeder (Penumpang) akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

i. Data Informan I

Nama	: Budi Rifani, S.Sos
Umur	: 51 Tahun
Jabatan/ Bidang	: Sekretaris Dinas Perhubungan
Tanggal Pertemuan	: 21 November 2025

Hasil wawancara dengan Bapak Budi Rifani, Selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, menyampaikan bahwa pengelolaan transportasi publik, terutama tertuju kepada layanan *Feeder* Trans Banjarbaru, program tersebut tidak terkena dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Bapak Budi Rifani juga menjelaskan bahwa layanan transportasi publik tidak terganggu ataupun tidak terlibat oleh adanya pemotongan atau pengurangan anggaran yang disebut Kebijakan Efisiensi Anggaran. Namun, ada beberapa bagian-bagian di mana pemotongan atau pengurangan efisiensi sendiri itu dilakukan, contohnya seperti pembuatan halte, marka jalan, rambu jalan, dan lampu merah.

Dimana aspek pembagian utama pelayanan transportasi dari satu pandangan tidak terpengaruh (terdampak) oleh efisiensi yang ada pada tahun 2025 saat ini, yang hanya merupakan penyesuaian anggaran. Bapak Budi Rifani juga menegaskan bahwa tujuan utama dari

dibentuknya pengelolaan transportasi publik yaitu Program Feeder Trans Banjarbaru adalah untuk membuat masyarakat merasa nyaman dan mendapatkan layanan yang baik, sehingga anggaran tidak digunakan untuk hal-hal yang dapat mengganggu operasional.

“Pada pengelolaan transportasi publik *Feeder* Trans Banjarbaru saat ini tidak ada dampak efisiensi maupun pemotongan anggaran, saat ini memang ada bagian yang terpankas seperti contohnya pembuatan halte, rambu jalan, marka jalan, atau pun lampu merah. Tetapi itu juga tidak berpengaruh besar. Karena tujuan utamanya tetap pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat, tertuju kepada Visi dan Misi Walikota Banjarbaru”.

ii. Data Informan II

Nama : Indah Astuti, S.H

Umur : 40 Tahun

Jabatan/ Bidang : Kepala Seksi Angkutan Transportasi/
Bidang Sarana Prasarana Transportasi

Hari & Tanggal Pertemuan: 04 November 2025

Ibu Indah Astuti, Kepala Seksi Angkutan Transportasi, menjelaskan dalam wawancara bahwa Program Transportasi Publik yang ada di daerah Kota Banjarbaru yaitu Trans Banjarbaru yang dimana itu adalah Program Baru dari Pemerintah Kota Banjarbaru tentunya dibawah tanggung jawab pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

“Transportasi Publik yang ada dikota Banjarbaru yaitu Trans Banjarbaru atau bisa disebut dengan *Feeder* yang sebelumnya bernama Angkutan Juara di mulai launchingnya dari tahun 2024 bulan September tahun lalu”.

Dinas Kota Banjarbaru mengadakan program Tranportasi Publik bertujuan menekankan angka kepadatan mobilitas pribadi dan menyediakan layanan transportasi publik yang modern, nyaman, aman, efisien dan terintegrasi bagi masyarakat Kota Banjarbaru.

“Tranportasi Publik Trans Banjarbaru ini memang salah satu program Dinas Perhubungan di Pemerintahan Kota Banjarbaru, yang bertujuan untuk kenyamanan masyarakat Kota Banjarbaru, agar mempermudah akses perjalanan. Karena layanan ini Transportasi *Feeder* yang dimana daerah kecil untuk menuju kejalur Utama dijalan Ahmad Yani yang dapat mempermudah pengguna dalam menuju akses Transportasi berikutnya yaitu Bus-bus Tayo atau BTS Trans Banjarbakula”.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menjalin kerja sama atau kontrak dengan Perusahaan PT. Bagong Dekaka Makmur yang sebagai pengelola dari Tranportasi Publik Trans Banjarbaru (*Feeder*) terkait dengan operasional, fasilitas sampai dengan pelayanan kepada pengguna.

“Jadi program ini bisa disebut menyewa Jasa, karena anggaran kami ini masuknya kedalam Rekening Belanja Jasa Sewa namanya, kami menyewa Pada PT. Bagong Dekaka Makmur mereka yang menjalankan operator serta pelaksananya dari mereka semua terkait Karyawan (Sopir) sampai dengan *Maintenance* (Mekanik) dari PT. Bagong Dekaka Makmur semua yang menjalankan, Dinas Perubungan Kota Banjarbaru hanya menyewa jasa kepada mereka bisa disebut Dinas Perhubungan sebagai Regilatornya dan PT. Bagong Dekaka Makmur Menjalankannya sebagai Operator”

Dinas Perhubungan menjalankan kerja sama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur juga memiliki perjanjian diawal terkait trayek yang di minta Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menetapkan 20 trayek

sebagai target pengembangan layanan Trans Banjarbaru pada tahap awal perencanaan. Namun, hanya tujuh trayek yang berhasil diselesaikan dalam delapan bulan pertama pelaksanaannya. Beberapa hal, seperti kesiapan armada, masa percobaan dan kebutuhan uji kelayakan trayek di lapangan, memengaruhi dalam penentuan trayek. Seiring berjalannya waktu, jumlah trayek yang beroperasi kemudian meningkat dengan adanya evaluasi dan koordinasi terus-menerus antara Dinas Perhubungan dan operator PT. Bagong Dekaka Makmur. Kemudian dengan ditambahkan empat trayek baru, total trayek yang telah berjalan sekarang adalah 11 trayek Trans Banjarbaru. Perkembangan ini menunjukkan bahwa, meskipun realisasi awal belum mencapai target, layanan transportasi publik telah berkembang secara bertahap sesuai dengan rencana kebijakan regulasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

“Sebenarnya, sejak sebelum adanya instruksi Presiden tentang Kebijakan Efisiensi Anggaran pada tahun 2025, program transportasi publik feeder ini sudah berjalan dengan lancar dari awal bulan september 2024. Jadi, ketika kebijakan efisiensi anggaran itu mulai diterapkan, program ini tidak terlibat adanya dampak yang berarti terhadap operasional program transportasi publik *Feeder* Trans Banjarbaru. Pengelolaan keuangan pun sudah sangat jelas, karena sejak awal sudah ada anggaran langsung yang dialokasikan khusus untuk program feeder ini. Oleh karena itu, kami tidak mengalami kendala dalam pembiayaan akibat kebijakan efisiensi anggaran saat ini”

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berbicara tentang konteks anggaran karena kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dapat

berdampak pada anggaran pendapatan belanja daerah yang mengakibatkan Efisiensi didalamnya, maka dari itu bagaimana alokasi dan mekanisme pembiayaan dirancang, serta seberapa besar kebijakan tersebut berdampak pada operasi Feeder Trans Banjarbaru. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Indah Astuti, perubahan kebijakan di tingkat pusat tidak mempengaruhi kelangsungan pendanaan program feeder karena telah memiliki struktur anggaran di perjanjian kontrak yang stabil sejak dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran program ini sudah direncanakan sejak awal untuk menjaga stabilitas pembiayaan, meskipun instruksi efisiensi anggaran diterapkan.

“kalau untuk dampak sebenarnya ada dampak efisiensi yang terlihat, tetapi hanya di beberapa aspek saja. Misalnya, halte, rambu, dan marka jalan saat ini ada pemotongan sekian persen karena anggaran harus disesuaikan. Namun, untuk Transportasi *Feeder* Trans Banjarbaru tidak terpengaruh sama sekali. Anggaran untuk program tersebut sudah direncanakan secara khusus sejak awal, dan program ini diprioritaskan untuk memberikan kenyamanan dan layanan kepada masyarakat juga sampai saat ini masih digratiskan pemerintah kota banjarbaru. Oleh karena itu, meskipun ada efisiensi, operasional *feeder* tetap berjalan seperti biasa”.

Ibu Indah Astuti juga menyampaikan terkait penyusunan anggaran RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dari awal Januari sampai dengan Desember serta penambahan anggaran belanja bisa disebut dengan ABT (Anggaran Belanja Tambahan, anggaran yang Ibu Indah jelaskan bahwa dari awal tahun anggaran, proses perencanaan anggaran untuk program Feeder Trans Banjarbaru ini telah dilakukan dengan sangat baik. Anggaran dasar RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

dibuat sejak awal Januari hingga akhir Desember. Dari pada itu merencanakan semua kebutuhan operasional dan program *feeder* sehingga anggaran tahunan dapat dipenuhi sepenuhnya. mereka merancang semua hal yang diperlukan saat menyusun RKA ini, mulai dari biaya operasional, perawatan, dan bahan bakar hingga biaya kas kecil untuk kebutuhan sehari-hari.

Ibu Indah Astuti juga menjelaskan selain itu, kami mengalokasikan untuk program *feeder* ini pada ABT (Anggaran Belanja Tambahan) karena masuk pada pertengahan tahun 2024 ketika program *feeder* ingin di programkan namun, penting untuk diingat bahwa ABT hanya dialokasikan untuk tujuh trayek pertama, yang kami anggap sebagai perlindungan anggaran tambahan untuk memastikan bahwa trayek baru tersebut dapat berjalan dengan stabil saat peluncurannya, tanpa mengganggu anggaran rutin yang sudah direncanakan di RKA pada akhir tahun 2023. Selain itu, kami telah menyiapkan perencanaan untuk anggaran tahun 2025 sejak akhir tahun 2024. Semua kebutuhan layanan *feeder* untuk tahun anggaran 2025 dimasukkan ke dalam RKA pada akhir tahun 2024, sehingga ketika tahun anggaran baru dimulai, anggaran untuk satu tahun penuh sudah terkunci di RKA yang sebelumnya hanya memiliki 7 Trayek pada tahun 2025 menjadi 11 Trayek yang dimana anggaran itu sudah di alokasikan pada akhir tahun 2024.

Dengan cara ini, manajemen anggaran operasional feeder menjadi sangat jelas dan terstruktur baik untuk operasional rutin maupun operasi rutin. Karena program feeder telah direncanakan secara menyeluruh melalui RKA pada bidang sarana prasarana angkutan transportasi, operasional feeder dapat dilakukan tanpa kendala finansial yang signifikan. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa keberlanjutan program feeder dari sisi pendanaan sangat kuat oleh pemerintah untuk masyarakat.

iii. Data Informan III

Nama : S. Putri Wulandari
 Umur : Tahun
 Jabatan/ Bidang : Staff/ Bidang Operasional
 Tanggal Pertemuan : 08 November 2025

Ibu S. Putri Wulandari selaku penanggung jawab pada operasional Feeder Trans Banjarbaru dari PT. Bagong Dekaka Makmur menjelaskan bahwa layanan transportasi publik yang saat ini dikenal sebagai Trans Banjarbaru pada awalnya diluncurkan pada tanggal 1 September 2024 dengan nama Angkutan Juara. Setelah berjalan beberapa bulan, dilakukan proses rebranding menjadi Trans Banjarbaru. Perubahan nama tersebut merupakan bagian dari upaya bertujuan agar lebih mudah dikenal masyarakat.

Dalam segi pengelolaan PT Bagong bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai operator pelaksana dalam

pengelolaan transportasi tersebut. Menurut Ibu S. Putri Wulandari, seluruh operasi dijalankan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merencanakan 20 trayek yang akan dijalankan secara bertahap pada kontrak awal. Pada awal peluncuran, layanan beroperasi dalam 7 trayek kemudian, jumlah ini meningkat menjadi 4 trayek lagi, menjadi total 11 trayek yang saat ini beroperasi dalam satu tahun berjalan.

“Kami ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Ini sebenarnya program mereka, nah kami PT.Bagong Dekaka Makmur ini memfasilitasi sebagai operator yang menjalankannya di Lapangan. Semuanya harus sesuai dengan standar Dinas Perhubungan yang diterapkan, dari mulai trayek yang diminta sampai dengan kenyamanan layanan ke pengguna itu semua kami jalankan. Kerjasamanya itu sudah diatur secara kontrak (*by contract*)”.

iv. Data Informan IV

Nama : Hadriani
 Umur : 32 Tahun
 Jabatan/ Bidang : Sopir Feeder Trans Banjarbaru
 Tanggal Pertemuan : 17 November 2025

Bapak Hadriani selaku pramudi (sopir) layanan *feeder* Trans Banjarbaru menunjukkan bahwa tidak mengetahui terkait anggaran yang dikelola oleh operasional, tetapi dari pelayanan yaitu aspek keselamatan dan kepuasan pekerja yang menjadi fokus utama dalam operasional harian. Bapak Hadriani menyampaikan bahwa telah bertugas sejak layanan ini diluncurkan pada Bulan September 2024.

Bapak Hadriani juga menyatakan bahwa lingkungan pekerjaan di PT.Bagong Dekaka Makmur dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terutama Pemerintahan Kota Banjarbaru dan menjadikan beliau terasa nyaman walaupun dengan adanya sistem kontrak kepada pramudi yaitu selama empat bulanan dan gaji yang stabil sekitar Rp 3,2 juta hingga Rp 3,4 juta, yang dimana tentu saja sudah mendapatkan tunjangan lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan. Tugas pramudi hanya berfokus penuh pada kegiatan mengemudi, sementara dari semua urusan biaya operasional dan pengisian BBM merupakan tanggung jawab tim operasional di PT.Bagong Dekaka Makmur. Terkait keamanan justru diutamakan melalui pelaksanaan yang namanya P2H Pemeriksaan dan Pengecekan Harian maka itu wajib dilakukan sebelum beroperasi.

“terkait kebijakan efisiensi pada saat ini menurut saya itu terfokus pada instansi-instansi pemerintahan saja ya, jadi untuk kepada masyarakat mungkin tidak berpengaruh besar dari adanya kebijakan tersebut. Dan selama saya bekerja menjadi Pramudi di *Feeder* ini Alhamdulillah tidak pernah mendapatkan kendala yang besar terkait Gaji sudah sesuai dengan UMK Kota Banjarbaru”.

v. Data Informan V

Nama	: Siti Fatmah
Umur	: 25 Tahun
Jabatan/ Bidang	: Penumpang Trans Banjarbaru
Tanggal Pertemuan	: 17 November 2025

vi. Data Informan VI

Nama : Akhmad
 Umur : 37 Tahun
 Jabatan/ Bidang : Penumpang Trans Banjarbaru
 Tanggal Pertemuan : 17 November 2025

Hasil wawancara yang diperoleh dengan dua penumpang Trans Banjarbaru yaitu Kakak Siti Fatmah dan Bapak Akhmad dari dua informan menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda tentang menggunakan transportasi Feeder Trans Banjarbaru. Dari Kakak Siti Fatmah adalah seorang pekerja swasta yang setiap hari bekerja dari rumah ke tempat kerja, beliau mengatakan bahwa ia mengetahui tentang keberadaan layanan *feeder* Trans Banjarbaru sejak awalnya melalui unggahan media sosial yaitu Instagram. Kakak Siti Fatmah juga mengatakan Transportasi *feeder* Trans Banjarbaru dianggap lebih hemat dari segi keadaan, juga efisien, dan mengurangi stres selama perjalanan karena transportasi pribadi sering terkendala biaya bahan bakar.

“Saya mengetahui Transportasi publik ini sudah dari awal *Feeder* mulai beroperasi, yang awalnya sering disebut Angkutan Juara. Saya senang adanya program ini dari fasilitas pelayanan yang nyaman dan sangat efisien untuk kegiatan harian, seperti saya untuk berangkat kerja, awalnya saya naik *Feeder* ini dari dekat rumah menuju halte untuk berganti naik Bus Trans Banjarbakula. Sangat terbantu ada program ini di Kota Banjarbaru.”

Sementara itu Bapak Akhmad adalah seorang pedagang yang merupakan penumpang kedua sebagai informan yang mengetahui layanan ini sekitar 6 bulan setelah peluncuran melalui orang-orang yang ramai menggunakan Transportasi Trans Banjarbaru ini. memilih naik Trans Banjarbaru karena tarifnya digratiskan oleh pemerintah Kota Banjarbaru.

“Saya mencoba program ini baru-baru saja sekitar 6 bulan yang lalu juga, Alhamdulillah dengan adanya Program ini saya sebagai pedagang tidak perlu lagi menggunakan ojek maupun online setelah saya merasakan nyaman atas pelayanan di Transportasi *Feeder* Trans Banjarbaru ini mudah juga untuk berpegiaan membawa dagangan saya, harapan saya Pemerintah Kota Banjarbaru makin maju, lebih memprioritaskan kenyamanan kepada Masyarakat, dan juga terus Gratis seterusnya.”

Terkait hasil wawancara dari kedua penumpang memiliki pandangan serupa bahwa Trans Banjarbaru telah memberikan pelayanan yang baik selama program berjalan 1 Tahun ini. Informan pertama Kakak Siti Fatmah menilai kenyamanan fasilitas pelayanan yang bersih dan menghemat biaya untuk BBM pribadi, dan cocok untuk berkegiatan harian. Dari Bapak Akhmad menyampaikan mudah dan nyaman untuk menggunakan *Feeder* Trans Banjarbaru dikarenakan titik tujuan yang pas dan tarif biaya yang gratis.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang sesuai kriteria hasil wawancara awal dan lapangan selama penelitian, Untuk memahami lebih lanjut

informasi yang dikumpulkan, peneliti melakukan proses analisis data berdasarkan temuan dari wawancara dengan subjek yang sesuai dengan kriteria, serta temuan dari wawancara awal dan lapangan selama penelitian.

Selain menguraikan jawaban setiap informan, analisis ini juga mengelompokkan data ke dalam tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, membandingkan perspektif antara informan, dan menghubungkannya dengan data tambahan seperti literatur, dokumen, dan observasi. Melalui analisis data ini, peneliti berusaha menemukan pola hasil yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang dampak efisiensi anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terhadap pengelolaan transportasi publik. Dampak efisiensi anggaran dalam penelitian ini dipahami sebagai perubahan dalam pengelolaan anggaran dan capaian pelayanan publik sebagai hasil dari optimalisasi penggunaan sumber daya.

1. Kebijakan Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan terhadap Pengelolaan Transportasi Publik di Kota Banjarbaru.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru kemudian menerapkan kebijakan efisiensi anggaran ini dengan mempertahankan keadaan layanan kepada masyarakat. Sebagian besar informan yang diwawancarai mengatakan bahwa efisiensi ini dilakukan secara selektif, sehingga fokusnya bukan pada mengurangi pengelolaan transportasi publik, tetapi lebih pada merancang cara pengeluaran yang dialokasikan.

a. Dasar Kebijakan Efisiensi Anggaran pada Pengelolaan Transportasi Publik

Dasar Kebijakan Efisiensi Anggaran pada Transportasi Publik di Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang saat ini Kebijakan efisiensi anggaran dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, adalah pemegang program transportasi publik yaitu *feeder* Trans Banjarbaru, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk menerapkan kebijakan efisiensi dan optimalisasi anggaran pemerintah. Instruksi presiden tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan memprioritaskan program prioritas dan meminimalkan kegiatan lainnya.

Dalam konteks dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, efisiensi anggaran bukanlah menjadi pengurangan atau pemangkasan dari program Transportasi Publik feeder Trans Banjarbaru tersebut, tetapi penyesuaian untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tetap memberikan dukungan yang efisien dan efektif untuk pelayanan publik yang strategis dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa dampak efisiensi anggaran muncul dalam bentuk penyesuaian pengelolaan dan prioritas anggaran, bukan pada pengurangan layanan utama.

Menurut (Aryansyah, 2025) efisiensi anggaran pemerintahan itu memang penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan nasional, dengan cara pengoptimalan penggunaan dana pada sektor publik, agar tercapai lebih banyak tujuan dengan sumber daya yang terbatas. Menurut (Aryansyah, 2025) optimalisasi pelayanan publik dengan mengelolala anggaran secara efisien serta meningkatkan pemerintahan akan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang stabil, alasannya dana yang dialokasikan secara akan tepat sasaran dan kegiatan yang lebih baik juga menguntungkan secara sisi positif. Dari Kebijakan efisiensi ini mewajibkan organisasi untuk memastikan bahwa setiap belanja memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam proses pengumpulan data tidak diperoleh informasi berupa persentase atau angka pasti mengenai besarnya pengurangan anggaran. Tetapi analisis efisiensi dalam penelitian ini difokuskan pada bentuk penyesuaian anggaran yang terjadi di lapangan saat ini halnya pada sarana dan prasarana terkait penyesuaian alokasi anggaran untuk pembangunan dan perawatan yaitu halte, rambu, dan fasilitas pendukung layanan Transportasi publik diKota Banjarbaru.

Dengan penyesuaian anggaran tersebut dapat dilihat juga dari perubahan skala prioritas program, penundaan beberapa

kegiatan, serta dalam penyederhanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan setelah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Dinas Perhubungan mengutamakan program layanan dasar, sementara itu beberapa kegiatan yang bersifat non-prioritas telah terdapat penundaan dan pengurangan frekuensi kegiatan operasional, dalam hal ini tentu saja menyesuaikan kemampuan anggaran.

Namun, Dinas Perhubungan berusaha memastikan bahwa fasilitas yang ada tetap berfungsi dengan baik untuk mendukung pelayanan Transportasi publik. Analisis ini berpendapat bahwa efisiensi tidak selalu berarti mengurangi biaya, tetapi memastikan bahwa setiap pengeluaran menghasilkan manfaat maksimal (Wijaya et al., 2025). Oleh karena itu, kondisi lapangan dari sarana dan prasarana menunjukkan bagaimana efisiensi anggaran diterapkan dalam pengelolaan transportasi publik.

b. Pengelolaan Transportasi Publik

Pengelolaan Transportasi Publik tidak terlepas dari penyusunan anggaran sampai dengan operasional pelayanan. Hasil pendapat informan yang diwawancarai dari Sekretaris dan Sub. Bagian Sarana Prasarana Transportasi seksi Angkutan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, pengelolaan transportasi publik dimulai dari membuat anggaran tahunan. Anggaran tahunan

dibuat setiap awal tahun anggaran, dari Januari hingga Desember, dan digunakan untuk mengelola kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Anggaran tahunan dimulai dengan menentukan akan kebutuhan lapangan. Terlingkup dari kegiatan yang termasuk pemeliharaan halte, perbaikan marka jalan, perawatan lampu lalu lintas, dan dukungan untuk Program operasional transportasi publik yaitu *Feeder Trans Banjarbaru*.

Sebelum diajukan untuk usulan anggaran, data yang diperlukan kemudian dianalisis dan diverifikasi untuk selanjutnya. Dalam mekanisme perencanaan disesuaikan setelah penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Yang dimana Dinas Perhubungan tidak dapat memenuhi semua usulan belanja, jadi ada skala prioritas. Segi pemeliharaan sarana transportasi yang menjadikan salah satu belanja prioritas yang berkontribusi langsung pada keselamatan dan kelancaran lalu lintas terutama kenyamanan sektor publik di Kota Banjarbaru.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan efisiensi anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas aturan keuangan yang diterapkan. Menurut (Burhanuddin & Akram, 2025) yang menyatakan bahwa perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan yang efektif berperan penting dalam mengatasi inefisiensi anggaran. Dengan manajemen keuangan yang baik, keterbatasan

anggaran tetap dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang menjadi prioritas utama.

Menurut (Yansih, 2022) Pengelolaan penganggaran ini dilakukan sesuai dengan istilah *value for money*, yang artinya menempatkan pengelolaan keuangan publik pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menurut informan, meskipun ada penghematan, fokus penggunaan anggaran tetap pada pencapaian hasil dan prioritas untuk pelayanan. Maka pandangan ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2018) bahwa anggaran sektor publik berfokus pada serapan anggaran dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk prioritas utama.

Dalam kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan kebijakan tersebut (Inpres, 2025), penelitian ini mengkaji efisiensi anggaran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan transportasi publik sebagai bentuk implementasi kebijakan efisiensi belanja pemerintah daerah. Efisiensi yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pengurangan anggaran, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana agar tetap mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sampai saat ini terus memastikan operasional transportasi publik tetap berjalan, terutama *Feeder Trans Banjarbaru* yang merupakan program prioritas

pemerintah daerah Kota Banjarbaru terutama dalam Visi Misi Walikota. Selain itu, fasilitas transportasi ini terus ditingkatkan secara berkala untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada penggunanya terkait memperbanyak Trayek, Armada sampai dengan operasinal lainnya. Dari upaya pencapaian ini dapat dianggap sebagai penerapan prinsip masalah dalam ekonomi Islam, yang berarti mengelola sumber daya publik dengan cara yang menguntungkan dan menghindari pemborosan serta memprioritaskan kepentingan sosial(Wijaya et al., 2025).

2. Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pelayanan Transportasi Publik di Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, efisiensi anggaran tidak terdapat dampak efisiensi terhadap Pelayanan Transportasi Publik *Feeder* Trans Banjarbaru tersebut tetapi hanya berdampak pada sarana dan prasarana. Kebijakan efisiensi anggaran membantu pengelolaan terhadap transportasi publik karena prioritas anggaran semakin terarah. Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dan Kepala Seksi Angkutan Transportasi menyampaikan bahwa program Trans Banjarbaru tetap menjadi bagian penting dari program meskipun efisiensi telah meningkat disaat berjalannya Program *Feeder* Trans Banjarbaru yang mana berarti bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak berkurang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu berarti pengurangan terhadap pelayanan, maka dari itu dapat menjadi pendekatan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk program yang paling penting bagi masyarakat, maka sesuai dengan ekonomi islam yang bertujuan untuk menjamin bahwa pengeluaran negara digunakan seefisien mungkin dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat (Farida, 2025).

Menurut (Jamasy & Marzuki, 2025) yang menyatakan bahwa efisiensi anggaran dapat dicapai melalui kolaborasi antara pengelolaan infrastruktur, sumber daya manusia, ekosistem organisasi, dan manajemen risiko. Dalam konteks penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengurangi layanan utama transportasi publik, melainkan melalui penyesuaian pada aspek pendukung seperti sarana dan prasarana agar anggaran tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dari hasil ini bisa dinyatakan pemahaman ini sejalan bahwa efisiensi merupakan perbandingan optimal antara input dan output, di mana instansi dapat menghasilkan keluaran yang maksimal dengan sumber daya minimal (Mahmudi, 2019). Selain itu, konsep *value for money* menegaskan bahwa anggaran yang efisien berarti anggaran digunakan secara hemat tanpa mengurangi kualitas layanan publik (Yansih, 2022). Dengan demikian, efisiensi anggaran yang diterapkan Dinas Perhubungan tetap

memungkinkan pelayanan publik berjalan optimal melalui pengalokasian sumber daya pada program prioritas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada penurunan juga tidak mempengaruhi kualitas layanan utama Program *feeder* Trans Banjarbaru, maka dari hasil lapangan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memperlihatkan upaya dampak pengembangan sarana prasarana dan pendukung operasional transportasi publik, ketika keputusan efisiensi tidak diimbangi dengan evaluasi menyeluruh maka ada kemungkinan menurunkan kenyamanan masyarakat (Bizlabco, 2025). Seperti, penundaan dapat menyebabkan biaya perbaikan meningkat atau layanan masyarakat menjadi kurang nyaman.

Maka dalam penelitian ini tidak berarti efisiensi itu salah tetapi lebih tentang akibat dari pemangkasan anggaran yang membuat beberapa kebutuhan transportasi publik tidak terpenuhi dengan baik. Dalam hasil wawancara dengan seksi angkutan transportasi beberapa proyek seperti pembangunan halte, pemasangan marka jalan, dan perbaikan fasilitas lalu lintas terdapat pengurangan atau pemangkasan dari segi anggaran.

Dalam hal ini meskipun efisiensi anggaran tidak mengurangi layanan utama, hal itu masih menyebabkan keterbatasan ruang pengembangan pada aspek yang dianggap tidak mendesak. Pada situasi sarana prasarana, kegiatan pengembangan yang tidak memenuhi program prioritas memiliki pemangkasan di dalamnya terkait anggaran.

Pada pendapat ekonomi syariah Efisiensi sampai dengan Efektivitas anggaran sejalan dengan prinsip al-maslahah yang artinya mendahulukan penggunaan keperluan publik untuk tujuan yang lebih menguntungkan kepada masyarakat sosial(Wijaya et al., 2025). Sumber daya manusia harus diimbangi dengan beban administratif dan kesesuaian kinerja yang terlalu tinggi(Darmawati & Aisyah, 2021) meskipun efisiensi membantu akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi efisien, maka dari itu juga memiliki dampak efisiensi, yaitu lebih banyak tekanan kerja dan kurangnya fleksibilitas anggaran untuk menangani kebutuhan lain yang meningkat.